



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

**KEGIATAN :
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BUMD
BIDANG KEUANGAN**

**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2020**

I. KETENTUAN UMUM

- Nama Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan
- Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Besar Anggaran : Rp.410.000.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- L o k a s i : BUMD Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta luar provinsi
- Nama Pengguna Anggaran : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan menguatnya pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kontribusi PAD dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13/2006, PAD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat sedangkan lain-lain pendapatan yang sah meliputi dana-dana bantuan.

Kebijakan anggaran Pemerintah sekarang dan ke depan, subsidi akan dikurangi secara perlahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian peran PAD harus makin meningkat. Dengan subsidi Pusat yang makin berkurang, dan sesuai dengan semangat otonomi daerah, PAD akan menjadi sumber utama pendapatan Daerah. Porsi PAD yang lebih besar akan membuat struktur anggaran lebih sehat dan Daerah menjadi lebih mandiri serta lebih leluasa melaksanakan pembangunan.

Ke depan, komponen PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin sulit ditingkatkan karena akan membebani masyarakat. Maka deviden dari BUMD seharusnya dapat menjadi andalan, menyumbangkan porsi yang lebih besar dalam PAD. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham perlu melakukan pembinaan terhadap BUMD yang dimilikinya, agar kinerja BUMD semakin meningkat dan menjadi penyumbang PAD yang dapat diandalkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan BUMD bidang Keuangan dalam rangka mendorong peningkatan efektifitas kinerja BUMD melalui efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan SDM dan aset-asetnya. Selain hal tersebut, kegiatan ini juga merupakan fasilitasi upaya pemecahan masalah masing-masing BUMD/BUMN dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan menuju BUMD/BUMN yang sehat serta peningkatan setoran PAD dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

C. SASARAN

Sasaran Kegiatan penyusunan kebijakan BUMD Bidang Keuangan tahun 2020 adalah PD BPR BKK, PD BKK dan PT Bank Jateng yang merupakan lembaga bisnis milik Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan PAD serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

D. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan bumd bidang jasa produksi terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

1. RUPS dan Pra RUPS PT BPR BKK dan PT BKK Jateng.
2. Rakor Dewas Dan Direksi PT BPR BKK dan PT BKK Jateng.
3. Rakor Dewas/Komisaris PT BPR BKK dan PT BKK Jateng.
4. Rakor Direksi PT BPR BKK dan PT BKK Jateng.
5. Penilaian dan Pemberian Penghargaan BPR BKK dan BKK Terbaik Tahun 2020
6. Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.

E. TUJUAN DAN OUTPUT :

1. Kegiatan RUPS dan Pra RUPS PT BPR BKK dan PT BKK.
 - a. Tujuan :
Melaksanakan fasilitasi RUPS PT BPR BKK dan PT BKK.
 - b. Output :
Terlaksananya fasilitasi RUPS PT BPR BKK dan PT BKK.
2. Kegiatan Rakor Dewan Pengawas dan Direksi PT BPR BKK & PT BKK
 - a. Tujuan :
Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap Dewan Pengawas dan Direksi PT BPR BKK dan PT BKK serta memberikan pengetahuan bagi peserta mengenai teknik mengelola PT BPR BKK dan PT BKK agar pengawasan terhadap PT BPR BKK dan PT BKK lebih optimal.
 - b. Output
Terlaksananya peningkatan kualitas dan kompetensi Dewan Pengawas PT BPR BKK dan PT BKK

3. Rakor Dewas/Komisaris PT BPR BKK dan PT BKK Jateng
 - a. Tujuan :
Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap Dewan Pengawas/Komisaris PT BPR BKK dan PT BKK.
 - b. Output :
Meningkatkan kualitas dan kompetensi Dewan Pengawas/Komisaris PT BPR BKK dan PT BKK.

4. Rakor Direksi PT BPR BKK dan PT BKK Jateng
 - a. Tujuan :
Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap Direksi PT BPR BKK dan PT BKK serta memberikan pengetahuan bagi peserta mengenai teknik mengelola PT BPR BKK dan PT BKK agar pengawasan terhadap PT BPR BKK dan PT BKK lebih optimal
 - b. Output :
Meningkatkan kualitas dan kompetensi Direksi PT BPR BKK dan PT BKK

5. Kegiatan Penilaian dan pemberian penghargaan BPR BKK Terbaik (BPR BKK Award)
 - a. Tujuan :
Memberikan penghargaan kepada BPR BKK dan BKK terbaik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.
 - b. Output :
Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PD BPR BKK dan BKK terbaik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.

6. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah.
 - a. Tujuan :
 - 1) Meningkatkan pengetahuan tentang kinerja dan permasalahan BUMD provinsi lain.
 - 2) Meningkatkan pengetahuan tentang upaya yang dilakukan untuk mencapai target usaha BUMD.
 - 3) Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi BUMD Prov. Jateng.
 - 4) Meningkatkan kinerja BUMD Prov. Jateng.
 - b. Output :
 - 1) Meningkatnya pengetahuan tentang BUMD Provinsi lain.
 - 2) Meningkatnya pengetahuan tentang upaya yang dilakukan untuk mencapai target usaha BUMD.
 - 3) Adanya solusi atas permasalahan yang dihadapi BUMD Prov. Jateng.
 - 4) Meningkatnya kinerja BUMD Prov. Jateng.

F. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Bumd Bidang Keuangan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2020 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

G. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.410.000.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Semarang, Mei 2020

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN



EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660611 198602 1 001